

**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BANGKINANG
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat – syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari`ah
(SE.Sy)**



OLEH

**EKO OKTAH SUPRI LARIKY
NIM. 10725000069**

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI ISLAM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2012

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Bupati Kampar bagian pemerintahan yang berjumlah 4 orang. Dari populasi diatas penulis mengambil sampel dengan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang penulis maksud disini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan penulis dalam menjelajahi objek yang diteliti. Data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan metode induktif dan deduktif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembentukan kecamatan adalah untuk mempersingkat rentang kendali pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang ada di daerah kecamatan. Dan juga dapat memudahkan pemerintah memproses urusan pemerintahan dan mempermudah melakukan koordinasi maupun pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Bangkinang itu sendiri.

Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah akan mempercepat proses pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan dan memutus keterisoliran penduduk yang berada di daerah pedalaman dalam menjangkau ibu kota kecamatan sehingga mempermudah diberikan pelayanan kepada masyarakat maupun sebaliknya, serta mempercepat penyampaian informasi khususnya yang menyangkut program atau kebijaksanaan pemerintah daerah dan untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan inisiatif, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemekaran wilayah tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, karena dapat menjadi peluang-peluang baru untuk berusaha bagi para investor maupun bagi pengusaha kecil dan menengah. Dan selain itu masyarakat dapat dengan mudah untuk diberi arahan dan binaan melalui lembaga – lembaga tertentu guna untuk terciptanya masyarakat yang terampil dalam bidang apapun, terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai keahlian dan keterampilan apapun.

Dalam perkara ini penulis juga melihat bagaimana dengan adanya pemekaran wilayah maka akan terciptanya masyarakat yang sejahterah, optimis serta memiliki kemampuan menatap masa depan yang gemilang.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penelitian | 11 |
| BAB II. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGKINANG | |
| A. Sejarah Kabupaten Kampar | 13 |
| B. Sejarah Kecamatan Bangkinang | 14 |
| C. Keadaan Geografis | 15 |
| D. Potensi Daerah | 16 |
| E. Sejarah Pemekaran Wilayah | 16 |

| | |
|---|----|
| BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMEKARAN WILAYAH DAN | |
| PEREKONOMIAN MASYARAKAT | |
| A. Pengertian | 18 |
| B. Pemekaran Wilayah atau Daerah | 20 |
| C. Pendapatan Daerah | 24 |
| D. Pengertian Ekonomi | 29 |
| E. Kegiatan Ekonomi | 30 |
| F. Masalah Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam | 34 |
| BAB IV. DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP | |
| PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN | |
| ..BANGKINANG | |
| A. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap perekonomian Masyarakat .. | 39 |
| B. Tinjauan Ekonomi Islam | 52 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel I | : Nama Desa / Kelurahan dan Sistem Pemerintahan Tahun 2006 ... | 40 |
| Tabel II | : Banyaknya Pencari Kerja yang Mendaftar dan yang Telah diTempatkan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2002 (Sebelum Pemekaran) | 41 |
| Tabel III | : Banyaknya Pencari Kerja yang Mendaftar dan yang Telah diTempatkan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2002 (Sesudah Pemekaran)..... | 41 |
| Tabel IV | : Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Desa Tahun 2002 (Sebelum Pemekaran) | 42 |
| Tabel V | : Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Desa Tahun 2002 (Sesudah Pemekaran) | 42 |
| Tabel VI | : Jumlah Industri Menurut Desa Tahun 2002 (Sebelum Pemekaran) | 43 |
| Tabel VII | : Jumlah Industri Menurut Desa Tahun 2002 (Sesudah Pemekaran) | 43 |
| Tabel VIII | : Jumlah Perusahaan Perdagangan Yang Telah Mendapatkan SIUP di Kabupaten Kampar Menurut Golongan dan Kecamatan Pada Tahun Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah | 44 |

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel IX | : Banyaknya Kelompok Tani Menurut Kelas Kemampuan di Kabupaten Kampar Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah | 46 |
| Tabel X | : Banyaknya Fakir Miskin Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kampar Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah | 47 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berhubungan dengan pemberian otonomi daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Tujuan pemberian otonomi daerah agar memungkinkan suatu daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan pembangunan.¹

Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1999 memberikan arah pokok pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi,

¹¹ Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 dan No. 25, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 115

lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam kaidah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan otonomi daerah.
3. Mewujudkan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumberdaya.

Dari perspektif hubungan struktur kelembagaan pemerintahan, implikasi politik dari kewenangan urusan pemerintahan adalah adanya divergensi atau pembagian urusan, yang kemudian urusan yang dibagi ini menjadi kewenangan dari setiap struktur pemerintahan. Filosofi yang mendasari diperlukan adanya pembagian atau pemencaran urusan pemerintahan adalah karena wilayah negara terlalu luas untuk diurus oleh Pemerintah Pusat saja. Oleh karena itu, diperlukan desentralisasi dengan pembentukan daerah otonom dan pembagian urusan. Disamping itu dengan pembagian kerja antarberbagai susunan pemerintahan dapat menciptakan sinergi antar lembaga, efisiensi dan efektivitas pelayanan serta partisipasi masyarakat, sehingga ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan tercapai.²

² J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 148

Sebutan daerah dan wilayah agaknya belum berhasil ditemukan perbedaannya, bahkan keduanya sering dipertukarkan di dalam pemakaian sehari-hari. Menurut Sabari Hadi yang dikutip oleh J. Kaloh mengatakan bahwa perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula dengan kriteria seperti administratif, politik, ekonomi, social, cultural, fisik, geografis dan sebagainya.³

Pemerintahan wilayah beserta masyarakatnya akan semakin memainkan peran yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan social ekonomi masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan jika ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas. Semakin pentingnya kedudukan wilayah dalam menentukan kemampuan daya saing wilayah dalam era ekonomi global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Serta semakin nyata pula tuntutan perbaikan mutu dan keterpaduan perencanaan pembangunan wilayah/daerah sebagai jembatan untuk mengkatalisasikan kepentingan local maupun kepentingan nasional dalam pembangunan.⁴

Begitu juga dengan Kecamatan Bangkinang yang dimekarkan oleh Kabupaten Kampar, yang mana rentang pelayanan jadi pendek dan semakin efektif, sehingga perekonomian akan tumbuh dan berkembang dengan pesat.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Menurut Nursiah yang merupakan salah satu KABAG pemerintahan kantor Bupati Kampar mengatakan bahwa: “Kecamatan Bangkinang merupakan salah satu Kecamatan yang mempunyai daerah terluas sebelum di mekarkan, setelah di mekarkan kecamatan Bangkinang terpecah menjadi tiga kecamatan. Adapun daerah dari Kecamatan Bangkinang yang dimekarkan yaitu Kecamatan Bangkinang Barat, Kecamatan Bangkinang Seberang dan Kecamatan Salo.⁵

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet. dan perikanan darat, begitu juga dengan Kecamatan Bangkinang yang memiliki berbagai macam potensi daerah.⁶

Untuk itu di beberapa daerah terlihat tugas pemerintah maupun proses pembangunan terasa semakin berat, maka dalam mengantisipasi masalah tersebut pemerintah pusat perlu mempersempit jangkauan pengendalian dan mengusahakan efisiensi pelaksanaan pembangunan dengan cara melakukan pemekaran di beberapa daerah kabupaten dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, potensi ekonomi daerah serta faktor lainnya.

Seperti halnya di atas bahwa pemekaran daerah erat kaitannya dengan pembangunan. Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di daerah-daerah yang terbelakang, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi itu hanya

⁵ Nursiah, KABAG Pemerintahan, *wawancara*, 1 Juli 2011

⁶ <http://www.kamparkab.go.id/> 20 agustus 2011

merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus diperjuangkan, yakni mulai dari pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi di lingkungan hidup. Pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya.⁷

Dengan demikian, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.⁸

Menurut Marnis, di negara berkembang peranan pemerintah bukan saja perlu untuk menstabilkan kegiatan ekonomi tetapi juga untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Membangun infrastruktur yang lebih baik, menciptakan suasana kegiatan usaha yang memberikan prospek keuntungan yang baik dan memberikan insentif untuk kegiatan investasi baru merupakan beberapa bentuk usaha pemerintah yang penting peranannya dalam upaya untuk mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi.⁹

Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan untuk mengevaluasi cocok tidaknya strategi pembangunan

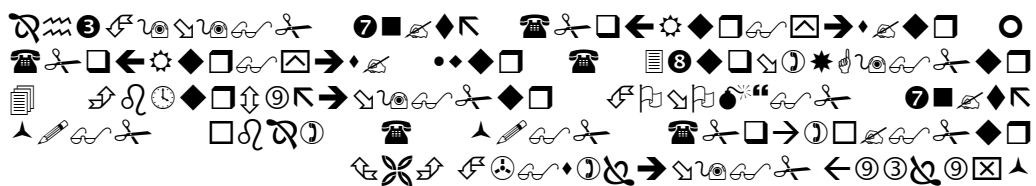
⁷ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga : 1997), Edisi Keenam, Jilid Pertama, h. 19.

⁸ *Ibid.*

⁹ Marnis, *Pengantar Bisnis*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007), h. 69

ekonomi yang diterapkan saat ini, apakah menggunakan pendekatan ekonomi kapitalis (industrialisasi) yang padat modal atau pendekatan ekonomi kerakyatan (pertanian) yang padat karya. Ekonomi suatu daerah akan kokoh kalau pelaku ekonomi dilakukan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat.¹⁰

Islam memandang pentingnya tolong menolong sesama manusia, hal ini sesuai dengan firman dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 6 yang berbunyi:



Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Pemerintahan Kecamatan Bangkinang yang dimekarkan melalui wilayahnya menjadi lebih sempit, disamping pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, pemekaran wilayah tersebut juga sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini juga sangat membantu masyarakat setempat yakni dengan adanya pemekaran wilayah dapat menjadi peluang-peluang bagi para investor maupun bagi para pengusaha kecil dan menengah.

Setiap wilayah baik secara alamiah, cultural maupun structural banyak memiliki perbedaan. Apabila perbedaan tersebut, tidak dikelola dengan baik, maka lahir wilayah yang kuat dan dapat mengeksploitasi wilayah yang lebih

¹⁰ Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM & Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 63

lemah. Kenyataan seperti ini bisa terjadi secara local, regional, nasional, maupun internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian daerah di Kecamatan Bangkinang.

Untuk itu penulis tertarik meneliti dengan judul **“DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BANGKINANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Untuk tidak terjadi kesalah-pahaman dalam Penelitian ini, penulis membatasi persoalan ini hanya membahas pada dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Bangkinang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Bangkinang ?
- b. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap dampak pemekaran wilayah Kecamatan Bangkinang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat Kecamatan Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap dampak pemekaran wilayah Kecamatan Bangkinang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah pengambilan tindakan perbaikan untuk selanjutnya, terutama bagi pemerintah Kecamatan Bangkinang dalam memperluas wilayahnya.
- c. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait, dimasa mendatang.
- d. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bangkinang. Sebagai alasan pemilihan Penelitian adalah; karena daerah ini merupakan salah satu Kecamatan yang dimekarkan oleh Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam Penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memekarkan daerah kecamatan Bangkinang tersebut. Sedangkan objek dalam Penelitian ini adalah dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Bangkinang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Bupati Kabupaten Kampar bagian pemerintahan yang berjumlah 4 orang. Penulis mengambil sampel dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilansampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang penulis maksud disini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang diteliti.¹¹

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data hasil secara langsung tentang dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Bangkinang. Data primer diperoleh dari bagian pemerintahan pada kantor Bupati Kampar.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), h. 104

b. Data Sekunder

Data ini merupakan informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data penelitian baik berupa, konsep, atau teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan. Untuk maksud tersebut penulis menggunakan metode kepustakaan.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilaksanakan langsung terhadap pegawai Kantor Bupati Kampar bagian pemerintahan. Guna memperoleh data mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Bangkinang.

b. Dokumentasi

Metode ini berupa data-data mengenai pemekaran wilayah di Kecamatan Bangkinang.

6. Metode Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu; menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar

persamaan jenis dengan data tersebut. Kemudian di uraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian disimpulkan sesuai dengan Penelitian.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian menyimpulkan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu mencari data-data yang umum kemudian disimpulkan secara khusus.

F. Sistematika Penelitian

Bab Satu menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode penulisan, sistematika penulisan.

Bab dua memberikan gambaran tentang lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah singkat daerah Kecamatan Bangkinang, kondisi geografis daerah, penduduk dan perkembangannya.

Bab tiga akan mengemukakan mengenai teori-teori yang akan melandaskan pembahasan penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka yaitu: pengertian, pemekaran wilayah atau daerah, pendapatan daerah,

perekonomian masyarakat, serta masalah ekonomi dalam perspektif ekonomi islam.

Bab empat merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat di kecamatan Bangkinang kota, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat di kecamatan Bangkinang kota.

Pada bab lima memuat kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGKINANG

A. Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dengan Ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.318 VII 1987. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 53 tahun 1993 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten Kampar dikepalai oleh seorang Bupati dengan satu orang wakil Bupati.¹²

Adapun factor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi ibu Kotamadya
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

¹² Dokumen Badan Pusat Statistik, *Kampar Dalam Angka*, 2009

4. Prospek masa depan kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru
5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

B. Sejarah Kecamatan Bangkinang

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Palalawan, Pasir Pangaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan undang-undang no. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuknya kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 1999 sudah enam belas kali masa jabatan Bupati kepala Daerah. Pada jabatan Bupati ke enam (H. Soebrantas S) ibukota kabupaten Kampar di pindahkan ke Bangkinang berdasarkan undang-undang no. 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

1. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Propinsi Riau
2. Disamping Pekanbaru sudah menjadi ibukota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.

3. Mengingat luasnya daerah kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

C. Keadaan Geografis

Kecamatan Bangkinang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGKINANG

A. Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dengan Ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.318 VII 1987. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 53 tahun 1993 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten Kampar dikepalai oleh seorang Bupati dengan satu orang wakil Bupati.¹

Adapun factor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi ibu Kotamadya
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

¹ Dokumen Badan Pusat Statistik, *Kampar Dalam Angka*, 2009

4. Prospek masa depan kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru
5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

B. Sejarah Kecamatan Bangkinang

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Palalawan, Pasir Pangaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan undang-undang no. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuknya kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 1999 sudah enam belas kali masa jabatan Bupati kepala Daerah. Pada jabatan Bupati ke enam (H. Soebrantas S) ibukota kabupaten Kampar di pindahkan ke Bangkinang berdasarkan undang-undang no. 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

1. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Propinsi Riau
2. Disamping Pekanbaru sudah menjadi ibukota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.

3. Mengingat luasnya daerah kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

C. Keadaan Geografis

Kecamatan Bangkinang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya menurut pengukuran Kantor Camat adalah $\pm 93,8 \text{ Km}^2$ atau 9,377 Ha, mempunyai 2 (dua) desa dan 2 (dua) kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kelurahan Bangkinang. Saat ini kecamatan Bangkinang sudah dimekarkan menjadi tiga kecamatan.

Pada akhir tahun 2007 Kecamatan Bangkinang mempunyai penduduk sebanyak 31.696 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 338 jiwa/ Km^2 .

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Bangkinang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Bangkinang Seberang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar dan Kampar Kiri

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan dan Kecamatan Bangkinang Barat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Barat dan Kecamatan Salo.²

D. Potensi Daerah

Potensi daerah yang akan dikemukakan pada bagian ini berupa potensi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industry, pertambangan serta potensi lainnya dengan data yang memungkinkan. Potensi daerah Kabupaten Kampar dipaparkan untuk memberikan gambaran kemampuan Kampar dalam membangun daerahnya. Otonomi daerah sangat mengutamakan kemandirian daerah dalam segala hal termasuk pembiayaan. Dengan demikian potensi daerah sangat berperan dalam pembiayaan daerah tersebut.

E. Sejarah Pemekaran Wilayah Kecamatan Bangkinang

Kecamatan Bangkinang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kampar. Dimana tumpuan perekonomian di Kabupaten Kampar terletak di Kecamatan Bangkinang. Sebelum adanya pemekaran wilayah Kecamatan Bangkinang merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki wilayah terluas dan juga termasuk salah satu daerah yang memiliki Desa dan Kelurahan terbanyak di Kabupaten Kampar. Setelah adanya pemekaran wilayah, maka Kecamatan Bangkinang di pecah menjadi empat kecamatan di antaranya :

² Katalog Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, *Kecamatan Bangkinang dalam angka in figures*, 2009

- Pada tahun 1996 Kelurahan Kuok dimekarkan menjadi Kecamatan Bangkinang Barat.
- Pada tahun 2005 Desa Salo dimekarkan menjadi Kecamatan Salo
- Pada tahun 2005 Desa Bangkinang Seberang dimekarkan menjadi Kecamatan Bangkinang Seberang

Setelah terjadinya pemekaran wilayah tersebut, maka pemerintah lebih mudah untuk memantau daerah pemerintahannya disebabkan ruang kendali makin dipersempit, sehingga pemerintah dapat mejangkau daerah yang sempat tak tersentuh sebelum pemekaran. Juga pemerintah mudah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang di putuskannya terutama dibidang perekonomian masyarakat.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMEKARAN

WILAYAH DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

A. Pengertian

Menurut J. Kaloh dalam bukunya bahwa, dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pembagian wilayah harus sejalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 1999 bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Namun menurut J. Kaloh pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 1999 tersebut seharusnya berbunyi; dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk didaerah provinsi dan di wilayah daerah provinsi dibentuk daerah kabupaten dan daerah kota.¹

Pemerintahan wilayah beserta masyarakatnya akan semakin memainkan peran yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan social ekonomi masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan jika ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas. Semakin pentingnya kedudukan wilayah dalam menentukan kemampuan daya saing wilayah dalam era ekonomi global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

¹ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 148

publik. Serta semakin nyata pula tuntutan perbaikan mutu dan keterpaduan perencanaan pembangunan wilayah atau daerah sebagai jembatan untuk mengkatalisasikan kepentingan local maupun kepentingan nasional dalam pembangunan. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan otonomi luas.²

Dari perspektif hubungan struktur kelembagaan pemerintahan, implikasi politik dari kewenangan urusan pemerintahan adalah adanya divergensi atau pembagian urusan, yang kemudian urusan yang dibagi ini menjadi kewenangan dari setiap struktur pemerintahan. Filosofi yang mendasari diperlukan adanya pembagian atau pemencaran urusan pemerintahan adalah karena wilayah negara terlalu luas untuk diurus oleh Pemerintah Pusat saja. Oleh karena itu, diperlukan desentralisasi dengan pembentukan daerah otonom dan pembagian urusan. Disamping itu dengan pembagian kerja antar berbagai susunan pemerintahan dapat menciptakan sinergi antar lembaga, efisiensi dan efektivitas pelayanan serta partisipasi masyarakat, sehingga ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan tercapai.³

Keberadaan pemerintahan daerah adalah sangat penting, antara lain:

1. Untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat
2. Agen demokratisasi dan memberikan pendidikan politik
3. Mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat

² *Ibid*, h. 46

³ *Ibid*, h. 168

5. Memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah
6. Misi utama pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dasar dan mengembangkan sektor unggulan dengan cara-cara demokratis
7. *Output and product* pemerintah daerah adalah:
 - a. *Public goods*, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan sebagainya.
 - b. *Public Regulations*, yaitu pengaturan-pengaturan berkaitan dengan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dan sebagainya.

Dari urgensi pemerintahan daerah tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulation yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴

B. Pemekaran Wilayah atau Daerah

Sebutan daerah dan wilayah agaknya belum berhasil ditemukan perbedaannya, bahkan keduanya sering dipertukarkan di dalam pemakaian sehari-hari. Menurut Sabari Hadi yang dikutip oleh J. Kaloh mengatakan bahwa perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula dengan kriteria seperti administratif, politik, ekonomi, social, cultural, fisik, geografis dan sebagainya.

⁴*Ibid, h. 169*

Dalam konteks pemekaran daerah atau wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.

Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan wilayah atau daerah otonom, seperti dalam pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah kabupaten dan daerah kota untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah telah mempersiapkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 129 tentang persyaratan pembentukan dan criteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, walaupun undang-undang tersebut telah direvisi menjadi UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam bab II pasal 4 sampai dengan pasal 8 menyatakan tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus. Persoalan sekarang adalah dengan mempertanyakan urgensi pembentukan pemekaran wilayah, dan pada saat bersamaan dengan pertimbangan bahwa penting atau tidak

pentingnya pemekaran wilayah atau daerah adalah dengan melihat kembali bahwa ternyata pemekaran itu sendiri merupakan peluang yang oleh masyarakat daerah merupakan “hasil diambil” karena didukung oleh undang-undang. Pada saat itu juga mendapat dukungan secara politik yakni dengan adanya pergerakan etnisitas masyarakat lokal.⁵

Terdapat beberapa urgensi dari pembentukan dan pemekaran wilayah, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan secara cepat terangkat dan terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya kesejahteraan
2. Memperpendek *span of control* (rentang kembali) manajemen pemerintahan dan pembangunan, sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien, dan terkendali
3. Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuh kembangkan inisiatif, kreatifitas, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan
4. Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran berdemokrasi masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pembangunan
5. Khusus daerah wilayah – wilayah perbatasan atau kepulauan.

Pembentukan dan pemekaran daerah adalah sebuah format pengaturan politik dalam penataan hubungan pusat dan daerah di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penataan ini telah melahirkan suatu

⁵ *ibid*

komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan bahwa otonomi daerah merupakan format pengaturan politik yang tidak bisa ditawar-tawar dalam konsep negara kesatuan republik Indonesia.⁶

Pemekaran daerah menjadi provinsi, kabupaten dan kota dapat dilihat dari dua sisi logika yaitu:

1. Logika formal, memandang bahwa terjadinya pemekaran wilayah disebabkan adanya dukungan formal undang-undang, sekaligus dengan undang-undang ini memberikan peluang kepada setiap daerah untuk berapresiasi dengan kesempatan ini, sehingga yang terjadi adalah banyak daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadikan daerahnya masing-masing menjadi otonom.
2. Logika realitas, memandang bahwa pembentukan daerah merupakan sesuatu yang benar-benar urgen secara realitas. Bahwa untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang ada di daerah, alternative pilihan terbaiknya hanyalah pembentukan dan pemekaran wilayah atau daerah
3. Logika politik, memandang bahwa adanya pergerakan-pergerakan social politik kemasyarakatan di tingkat local dengan ide pemekaran daerah dan pada saat bersamaan dengan membawa dan mengusung etnisitas daerah sebagai penguat menuju terjadinya pemekaran. Etnisitas menjadi motor penggerak masyarakat daerah.

⁶ *Ibid*

Menurut Ubed Abdillah S bahwa, ada tiga pendekatan teoritis utama dalam melihat fenomena etnisitas yaitu:

1. Pendekatan Primordialisme adalah melihat fenomena etnis dalam kategori-kategori sosio biologis yang beranggapan bahwa kelompok-kelompok social dikarakteristikan oleh gambaran seperti kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi social yang memang disadari secara objektif sebagai hal yang tidak bias dibantah.
2. Pendekatan konstruktivisme adalah memandang identitas etnis sebagai hasil dari proses social yang kompleks, manakala batasan-batasan simbolik terus menerus membangun dan dibangun oleh manfaat suatu hitungan sejarah, bahasa dan pengalaman masa lampau.
3. Pendekatan instrumentalisme adalah lebih menaruh perhatian kepada proses manipulasi dan mobilisasi politik ketika kelompok-kelompok social tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras dan bahasa.⁷

C. Pendapatan Daerah

Menurut Nurlan Darise, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain –lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daaerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

⁷ *Ibid*

desentralisasi. Pendapatan asli daerah bersumber dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁸

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.⁹

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari system dekonsentrasi ke system desentralisasi. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi atau administrasi lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat, badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, tetapi lebih merupakan

⁸ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007), h. 38

⁹ Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 25

kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi.¹⁰

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu disadari bahwa tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Di samping itu daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan ketatalaksanaan, kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi.¹¹

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup:¹²

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.*

¹² Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan* (pada satuan kerja perangkat daerah), (Jakarta: PT. Indeks, 2008) h. 39

- a. Hibah/bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvabilitas.
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Kemudian Abdul Hafiz menjelaskan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas; Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing dari jenis pendapatan asli daerah tersebut di atas dirinci lebih lanjut menjadi objek pendapatan dan rincian objek pendapatan.¹³

- a. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah di samping retribusi daerah. Menurut Rochmad Sumitro dalam bukunya yang dikutip oleh Josef Riwu Kaho bahwa; pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal untuk

¹³ Abdul Hafiz Tanjung, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 6

membiyai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.¹⁴

Secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Selain itu pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak terlalu besar sebab jika sangat fluktuatif juga kurang baik untuk keuangan daerah.¹⁵

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang pendapatan asli daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bias diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

¹⁴ Josef Riwu Kaho, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 143

¹⁵ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 21

Terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tertutup, untuk retribusi ini pemerintah daerah masih diberi peluang untuk menambah jenisnya namun harus pula memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-undang. Karena retribusi ini terkait dengan pelayanan tertentu, maka prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan tersebut. Tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi, dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.¹⁶

D. Pengertian Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “oikos” yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan “nomos” yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

¹⁶ *Ibid.* h. 25

E. Kegiatan Ekonomi

Secara garis besar Kegiatan Ekonomi terdiri dari :

1. Produksi

Produksi yaitu kegiatan menambah faedah (kegunaan) suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.

Kegiatan menambah faedah dibedakan sebagai berikut :

a. Produksi Barang yaitu kegiatan menambah faedah dengan mengubah sifat dan bentuknya. Hal ini terdiri dari barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi siap untuk dikonsumsi langsung, barang modal digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya.

b. Produksi Jasa yaitu kegiatan menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Terdiri dari jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan, contoh: film, perawatan dokter, pagelaran music. Jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan, contoh: pengangkutan, pergudangan, dan perbankan.

➤ Tujuan Produksi

- Secara umum : memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran.
- Secara khusus : dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen.
- Dari pihak produsen : untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan.

- Dari pihak konsumen : untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan.
- Fungsi Produksi
 - a. Menyediakan kebutuhan masyarakat
 - b. Meningkatkan keuntungan
 - c. Sebagai alat pemuas kebutuhan

2. Distribusi

Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen.

- Tujuan Distribusi

Adalah untuk menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai.
- Fungsi Distribusi
 - a. Memperlancar arus penyaluran barang dan jasa kepada konsumen.
 - b. Menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen.
- Saluran Distribusi
 - a. Saluran distribusi barang konsumsi langsung ke konsumen tanpa melalui perantara.
 - b. Saluran distribusi hasil industry sebagai berikut:

- Produsen agen distributor hasil industry pemakai hasil industry
 - Produsen agen pemakai hasil industry
 - Produsen distributor hasil industry pemakai hasil industry
 - Produsen pemakai hasil industry
- c. Saluran distribusi hasil pertanian sebagai berikut:
- Petani langsung ke pemakai
 - Petani tengkulak ke pemakai
 - Petani tengkulak grosir pedagang kecil pemakai
 - Petani pasar swalayan pemakai

3. Konsumsi

Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya.

- Tujuan Konsumsi
 - a. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

- Fungsi Konsumsi
 - a. Menjaga kelangsungan hidup
 - b. Memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan.

Kegiatan Ekonomi ini dilakukan oleh Pelaku Ekonomi yang terdiri dari:

a. Rumah Tangga Keluarga

Memiliki dua peran :

Pertama sebagai konsumen yaitu dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua sebagai penyedia jasa factor produksi berupa: modal, tenaga kerja, tanah dan lain-lain.

a. Rumah Tangga Produsen atau Perusahaan

Berupa kesatuan yuridis dan ekonomis dari factor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Di lihat dari kepemilikannya dibedakan menjadi BUMN dan BUMS. BUMN menekankan layanan kepada masyarakat tanpa bertujuan mencari laba. BUMN dan BUMS (Persero) hamper sebagian besar bertujuan mencari laba.

c. Pemerintah

Pemerintah sebagai pelaku ekonomi dapat dilihat dari kegiatan produksi dan konsumsi. Dari kegiatan produksi pemerintah memiliki andil dalam mengelola segala yang ada di alam ini. Dari kegiatan konsumsi adalah belanja keperluan Negara, perawatan harta Negara.

d. Masyarakat Luar Negeri

Berupa kerjasama yang baik antar Negara seperti :

a. Memperoleh pinjaman untuk pembangunan

b. Eksport hasil produksi

- c. Pengiriman tenaga kerja
- d. Berbagi perkembangan IPTEK
- e. Import barang

Peran dan Pola Interaksi Pelaku Ekonomi

Yaitu berupa hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi yang saling berkaitan satu sama lain. Berikut penggambarannya :

1. Rumah tangga keluarga membeli barang konsumsi atau jasa dari rumah tangga produsen.
2. Rumah tangga produsen atau perusahaan membutuhkan factor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga.
3. Perusahaan atau masyarakat membayar pajak kepada pemerintah.
4. Pemerintah membangun sarana dan prasarana umum untuk semua pihak dengan menggunakan uang pajak.
5. Adanya ekspor dan import.

F. Masalah Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Walaupun ekonomi islam memahami manusia dengan kebutuhan yang sifatnya terbatas, dan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya tanpa batas namun bukan tanpa masalah. Dalam rangka upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara lahiriah, maupun secara bathiniah, dengan harapan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun masalah ekonomi yang menjadi sorotan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta; 2007), h. 4

1. Ketimpangan Ekonomi

a. Individu dengan individu

Individu dengan individu yaitu lahir sebagai akibat keserakahan individu yang lebih kuat, dan lebih mampu dalam banyak aspek, sehingga menimbulkan eksploitasi sumberdaya yang tidak seimbang. Dengan tanpa peduli mereka yang kuat makin menguasai sumberdaya yang ada, sementara mereka yang lemah menjadi korban. Disini hak dan kewajiban masing-masing individu tidak terwujud dengan baik.

b. Kelompok dengan kelompok

Kelompok dengan kelompok yaitu sekelompok orang-orang kuat, membangun kerjasama dalam bisnis, maupun organisasi tertentu, supaya lebih kuat lagi dalam menguasai sumberdaya ekonomi dengan tanpa peduli terhadap kelompok lemah lain yang jumlahnya lebih banyak. Maka lahirlah kesenjangan yang makin melemahkan kelompok yang lemah.

c. Sektor dengan sektor

Sektor dengan sector yaitu ketimpangan yang terjadi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ketimpangan kelompok, dimana sector yang kuat (industry) yang dikelola dengan teknologi maju berhadapan dengan sector yang lemah yang dikelola secara tradisional atau memiliki ketergantungan

dengan sector yang kuat. Nilai dan harga dari produksi yang dihasilkan sangat mencolok perbedaannya, dengan posisi tawar yang sangat lemah bagi sector yang lemah. Ketimpangan sector inilah yang banyak membawa kemelaratan umat manusia, dimana mereka yang berada disektor lemah sangat sulit untuk bangkit.

d. Wilayah dengan wilayah

Setiap wilayah baik secara alamiah, cultural maupun structural banyak memiliki perbedaan. Apabila perbedaan tersebut, tidak dikelola dengan baik, maka lahir wilayah yang kuat dan dapat mengeksploitasi wilayah yang lebih lemah. Kenyataan seperti ini bisa terjadi secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.

e. Akhlak Ekonomi Manusia

Sudah merupakan Sunatullah bahwa manusia lahir kebumi dengan dua sisi. Ada sisi malaikat dan ada sisi hewaniyah. Bila sisi hewaniyah yang diperturutkan oleh manusia maka yang muncul adalah naluri hewan yang tidak mengenal aturan sehingga nafsulah yang diikuti. Pemerasan, pemalsuan, penipuan, pengutamaan kepentingan sendiri (egois) dan semua akhlak buruk lainnya akan mengambil peran dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi (bisnis).¹⁸

¹⁸ *Ibid*

2. Distribusi sumberdaya Alam

Di dalam suatu negara yang memiliki sumber daya alam, dalam bentuk hasil laut, hasil hutan, dan beraneka macam hasil tambang, sesungguhnya adalah milik rakyat. Karena itu harus diolah, dimanfaatkan atau dijual untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat atau keluarga dan kelompok pejabat. Masalah distribusi sumber daya alam semakin memperbesar kemiskinan sebuah bangsa jika tidak tertangani dengan baik. Dan ekonomi Islam mempunyai konsep yang jelas, bagaimana mengelola sumberdaya alam milik rakyat, bukan milik negara.

3. Pengelolaan Ekonomi Umat

Ekonomi umat adalah ekonomi yang berlandaskan persaudaraan yang berarti segala sesuatu dapat diselesaikan secara ikhlas, damai dan saling menguntungkan laksana orang yang bersaudara dalam satu keluarga besar, yang penuh kasih sayang diantara semua keluarga. Dengan demikian akan jauh dari perbuatan yang merugikan, mencelakakan dan membawa penderitaan bagi sesama saudara. Masalah ekonomi umat masih sangat memprihatinkan karena tingginya pemerasan antara satu dengan yang lain, yang menimbulkan kemiskinan yang berkepanjangan.

BAB IV
DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
BANGKINANG

A. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap perekonomian Masyarakat

Pada awalnya pemekaran wilayah terjadi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Kampar serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang.

Kemudian bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya social politik dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kampar, terutama kecamatan, dalam hal ini seperti kecamatan Bangkinang yang telah berhasil di mekarkan karena latar belakang tersebut.

Kecamatan Bangkinang merupakan kecamatan yang dimekarkan oleh Kabupaten Kampar menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang eberang dan Kecamatan Salo. Kecamatan Bangkinang terdiri dari beberapa desa dan kelurahan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1
Nama Desa/Kelurahan dan Sistem Pemerintahan tahun 2006

| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Status Pemerintahan |
|------------|----------------|---------------------|
| Bangkinang | Langgini | Kelurahan |
| | Bangkinang | Kelurahan |
| | Kumantan | Desa |
| | Ridan Permai | Desa |

Sumber: Bagian pemerintahan sekretaris daerah kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah pemekaran terjadi Kecamatan Bangkinang hanya memiliki 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Langgini dan Bangkinang dan dua Desa yaitu Desa Kumantan dan Ridan Permai.

Menurut J. Kaloh, negara dan pemerintah daerah dalam sektor ekonomi sangat berperan dalam mengarahkan, mengendalikan dan memberdayakan melalui serangkaian kebijakan. Peranan utama dalam kehidupan dan pembangunan bangsa akan berada di tangan dunia usaha dan masyarakat sendiri dan tidak lagi di tangan pemerintah.

Jumlah pencari kerja yang mendaftar dan yang telah ditempatkan menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin tahun 2002 dan 2006 (sebelum dan sesudah) pemekaran wilayah dapat diamati pada table di bawah ini :

Tabel IV.2

**Banyaknya Pencari Kerja yang Mendaftar dan yang Telah diTempatkan
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2002
(Sebelum Pemekaran)**

| Jenjang Pendidikan | Yang Mendaftar | | Telah diTempatkan | |
|--------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | Laki – Laki | Perempuan | Laki - Laki | Perempuan |
| SEKOLAH DASAR | 37 | 13 | 92 | 83 |
| SLTP | 49 | 18 | 198 | 173 |
| SLTA | 306 | 284 | 13 | 13 |
| SARJANA MUDA | 71 | 180 | - | - |
| SARJANA | 355 | 325 | - | - |
| Jumlah | 1.198 | 1.146 | 309 | 277 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Kampar

**Tabel IV.3
Banyaknya Pencari Kerja yang Mendaftar dan yang Telah diTempatkan
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2006
(Sesudah Pemekaran)**

| Jenjang Pendidikan | Yang Mendaftar | | Telah diTempatkan | |
|--------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | Laki – Laki | Perempuan | Laki - Laki | Perempuan |
| SEKOLAH DASAR | 92 | 94 | 8 | 1 |
| SLTP | 70 | 46 | 42 | 1 |
| SLTA | 2.776 | 1.846 | 139 | 7 |
| SARJANA MUDA | 143 | 278 | 5 | 1 |
| SARJANA | 492 | 493 | 12 | 2 |
| Jumlah | 3.573 | 2.757 | 206 | 12 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Kampar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pencari kerja dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan yang sangat baik, dan ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Adapun jumlah sarana perekonomian menurut desa pada tahun 2002 hingga 2006 (sebelum dan sesudah pemekaran wilayah) adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4
Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Desa
Tahun 2002
(Sebelum Pemekaran)

| Desa/Kelurahan | Pasar Umum | Toko | Kios Warung | KUD | Bank |
|----------------|------------|------|-------------|-----|------|
| Langgini | 0 | 165 | 400 | 0 | 3 |
| Bangkinang | 2 | 400 | 770 | 1 | 1 |
| Kumantan | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 |
| Ridan Permai | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 |

Sumber: Kantor Camat Bangkinang

Tabel. IV.5
Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Desa
Tahun 2006
(Sesudah Pemekaran)

| Desa/Kelurahan | Pasar Umum | Toko | Kios Warung | KUD | Bank |
|----------------|------------|------|-------------|-----|------|
| Langgini | 0 | 185 | 489 | 0 | 3 |
| Bangkinang | 2 | 677 | 799 | 1 | 4 |
| Kumantan | 0 | 23 | 91 | 0 | 0 |
| Ridan Permai | 0 | 33 | 63 | 0 | 0 |

Sumber: Kantor Camat Bangkinang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan sarana perkonomian masyarakat semakin meningkat dari sebelum pemekaran

wilayah dengan setelah pemekaran wilayah. Dan ini menandakan bahwa dengan pemekaran wilayah dapat menumbuhkan perekonomian yang baik bagi masyarakat di Kecamatan Bangkinang.

Seiring berkembangnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bangkinang, perindustrian juga tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel IV.6
Jumlah Industri Menurut Desa Tahun 2002
(Sebelum Pemekaran)

| Desa/Kelurahan | Kecil/Kerajinan | Menengah | Besar |
|----------------|-----------------|----------|-------|
| Langgini | 6 | 2 | 1 |
| Bangkinang | 6 | 3 | 2 |
| Kumantan | 3 | 0 | 0 |
| Ridan Permai | 3 | 0 | 0 |

Sumber: Kantor Desa

Tabel. IV.7
Jumlah Industri Menurut Desa Tahun 2006
(Sesudah Pemekaran)

| Desa/Kelurahan | Kecil/Kerajinan | Menengah | Besar |
|----------------|-----------------|----------|-------|
| Langgini | 11 | 8 | 3 |
| Bangkinang | 14 | 16 | 7 |
| Kumantan | 3 | 1 | 0 |
| Ridan Permai | 3 | 1 | 0 |

Sumber: Kantor Desa

Dari tahun sebelum dan sesudah pemekaran dapat dilihat bahwa industry kecil, menengah hingga besar mengalami peningkatan yang baik. Dan ini juga menandakan bagaimana perekonomian semakin membaik setelah terjadinya pemekaran. Hal ini membuat perekonomian masyarakat semakin baik dari tahun ke tahunnya.

Adapun jumlah perusahaan perdagangan yang telah mendapat SIUP di Kabupaten Kampar menurut golongan dan kecamatan pada tahun sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel IV.8
Jumlah Perusahaan Perdagangan yang telah mendapat SIUP di Kabupaten Kampar Menurut Golongan dan Kecamatan Pada Tahun Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah

| Keterangan | Sebelum Pemekaran | | Sesudah Pemekaran | |
|--|-------------------|------|-------------------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Perusahaan Besar / Large Establishment | 15 | 6 | 3 | 5 |
| Perusahaan Menengah / Medium Establishment | 13 | 8 | 14 | 14 |
| Perusahaan Kecil / Small Establishment | 217 | 155 | 154 | 128 |
| Total | 245 | 169 | 177 | 147 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perdagangan skala besar sebelum pemekaran pada tahun 2003 hingga 2004 terjadi penurunan, setelah pemekaran pada tahun 2005 hingga 2006 mengalami kenaikan yang baik dan ini merupakan suatu awal perkembangan perekonomian yang meningkat. Sementara itu dari perusahaan skala menengah dapat dilihat sebelum pemekaran mengalami penurunan yang cukup tinggi sedangkan

setelah pemekarang mengalami peningkatan yang normal.dan dari perusahaan skala kecil sebelum pemekaran dapat dilihat terjadi penurunan yang drastis dari jumlah 217 hingga 155 sedangkan setelah pemekaran jumlahnya hanya mengalami penurunan tidak begitu menjolok bahkan bia dikatakan wajar sebab dilihat dari bidang perusahaan kecil.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan perekonomian masyarakat dari sebelum dan sesudah pemekaran terjadi peningkatan perekonomian yang sangat baik serta bisa dikatakan hal ini menandakan bahwa perekonomian terlihat sudah lebih berkembang. Sehingga layak untuk di mekarkan menjadi beberapa Kecamatan.

Perekonomian masyarakat juga dapat dilihat dari sektor pertanian, dalam hal ini dilihat dari banyaknya kelompok tani menurut kelas kemampuan di Kabupaten Kampar tahun sebelum dan sesudah pemekaran wilayah :

Tabel IV.9
Banyaknya Kelompok Tani Menurut Kelas Kemampuan

di Kabupaten Kampar Tahun Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah

| Keterangan | Sebelum Pemekaran | | Sesudah Pemekaran | |
|-------------------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Pemula | 28 | 38 | 48 | 9 |
| Lanjut | 52 | 48 | 55 | 2 |
| Madya | 14 | 7 | 8 | - |
| Utama | - | - | - | - |
| Belum di Kukuhkan | 22 | 18 | 5 | - |
| Total | 116 | 111 | 116 | 11 |

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dan sesudah pemekaran kelompok tani mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan jumlah desa berkurang menjadi dua desa, sedangkan dua kelurahan yang ada telah termasuk dalam wilayah kota. Tentunya lahan yang tersedia untuk pertanian menjadi berkurang. Hal ini menandakan kemajuan yang mulai meningkat jika dilihat dari lahan yang hanya tersedia dari dua desa tersebut.

Adapun jumlah masyarakat fakir miskin dapat dilihat apad taberl berikut ini :

Tabel IV.10

**Banyaknya Fakir Miskin Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kampar
Tahun 2003**

| Keterangan | Sebelum Pemekaran | | Sesudah Pemekaran | |
|-------------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Laki – Laki | 244 | 178 | 168 | 174 |
| Perempuan | 201 | 267 | 206 | 212 |
| Total | 445 | 445 | 374 | 386 |

Sumber: Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa adanya pengurangan dari fakir miskin di Kecamatan Bangkinang. Hal ini dapat disimpulkan dengan adanya pemekaran wilayah, sangat berpengaruh terhadap berkurangnya masyarakat miskin karena pemerintah daerah mudah untuk mendata dengan sempurna perekonomian dari masyarakat perkecamatan.

Dengan adanya peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003, dibentuk Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Kecamatan Bangkinang Seberang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bangkinang, yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa pulau lawas
- b. Desa muara uwai
- c. Kelurahan pasir sialang
- d. Kelurahan pulau
- e. Desa suka mulya

- f. Desa laboy jaya
- g. Desa bukit Sembilan
- h. Desa bukit payung

Kecamatan Salo berasal dari sebagian wilayah kecamatan Bangkinang dan sebagian wilayah kecamatan Bangkinang Barat, yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa Salo
- b. Desa Salo Timur
- c. Desa Ganting
- d. Desa Ganting damai
- e. Desa Sipungguk
- f. Desa Siabu

Kecamatan Kampar Utara berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kampar, yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa Muara Jalai
- b. Desa Sungai Tonang
- c. Desa Sawah
- d. Desa Kampung panjang air tiris
- e. Desa Kayu aro

Kecamatan Rumbio jaya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kampar, yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa pulau payung

- b. Desa taratak
- c. Desa alam panjang
- d. Desa bukit kratai
- e. Desa batang batindih
- f. Desa tambusai

Kecamatan Kampar Timur berasal dari sebagian wilayah kecamatan Kampar, yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa pulau rumbai
- b. Desa Kampar
- c. Desa koto perambahan
- d. Desa pulau birandang
- e. Desa sungai putih
- f. Desa deli makmur

Kecamatan Kampar kiri tengah berasal dari sebagian wilayah kecamatan Kampar kiri yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa simalinyang
- b. Desa penghidupan
- c. Desa mayang pongkai
- d. Desa lubuk sakai
- e. Desa hidup baru
- f. Desa bina baru
- g. Desa karya bakti
- h. Desa koto damai

i. Desa hutama karya

Kecamatan gunung sahilan berasal dari sebagian wilayah kecamatan

Kampar kiri yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa gunung sahilan
- b. Desa kebun durian
- c. Desa subarak
- d. Desa gunung sari
- e. Desa suka makmur

Kecamatan perhentian raja berasal dari sebagian wilayah kecamatan

siak hulu yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa pantai raja
- b. Desa kampong pinang
- c. Desa hangtuah
- d. Desa sialang kubang

Kecamatan koto Kampar hulu berasal dari sebagian wilayah kecamatan

XIII koto Kampar yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa Siberuang
- b. Desa Bandar Picak
- c. Desa Gunung Malelo
- d. Desa Tabing
- e. Desa Pongkai
- f. Desa Tanjung

Dengan dibentuknya kecamatan Bangkinang seberang dan kecamatan Salo, maka wilayah kecamatan Bangkinang dikurangi dengan wilayah kecamatan bangkinang seberang dan kecamatan salo dan dengan dibentuknya kecamatan salo, maka wilayah kecamatan Bangkinang barat dikurangi dengan wilayah kecamatan Salo.¹

Adapun yang menjadi pertimbangan pembentukan kecamatan bila dilihat dari pelaksanaan urusan pemerintahan bahwa pembentukan kecamatan adalah untuk mempersingkat rentang kendali pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang ada di daerah kecamatan karena dengan letak ibukota kecamatan yang relative berdekatan desa kelurahan di wilayahnya, tentu akan mempercepat proses urusan pemerintahan dan mempermudah melakukan koordinasi maupun pengawasan.

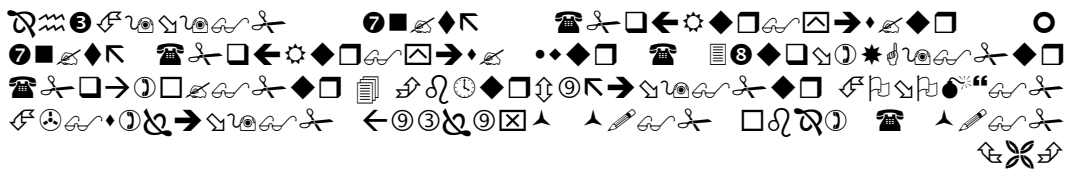
Kemudian mempercepat proses pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan dan memutus keterisoliran penduduk yang berada di daerah dalam menjangkau ibu kota kecamatan sehingga mempermudah diberikan pelayanan kepada masyarakat maupun sebaliknya, mempercepat penyampaian informasi khususnya yang menyangkut program atau kebijaksanaan pemerintah daerah. Disamping pertimbangan tersebut pembentukan pemekaran kecamatan perlu mempertimbangkan factor pendukung dan otonomi daerah yaitu ketersediaan personil, ketersediaan pembiayaan atau dana dan ketersediaan peralatan perlengkapan yang akan

¹ Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003

berpengaruh terhadap operasional keberhasilan pemerintahan wilayah kecamatan yang akan dibentuk.

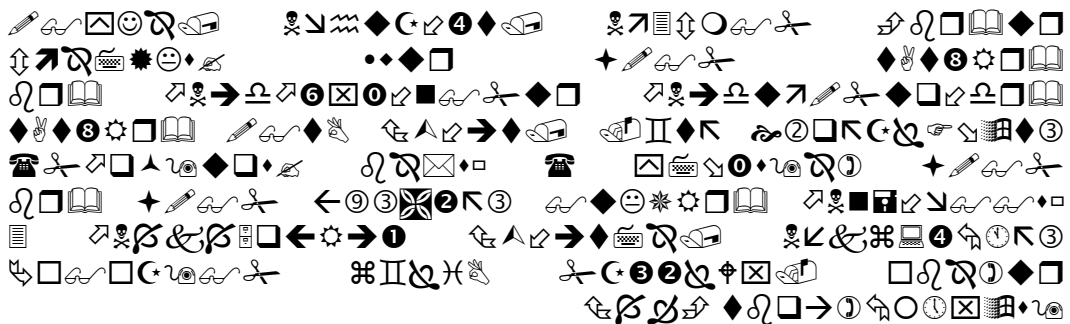
B. Tinjauan Ekonomi Islam

Islam memandang pentingnya tolong menolong sesama manusia, hal ini sesuai dengan firman dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 6 yang berbunyi:



Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dan juga Firman Allah swt :



Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati. hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. 5. Almaaidah:49)

Ayat diatas menyerukan kepada pemimpin agar memutuskan suatu keputusan hendaklah berdasarkan petunjuk Allah, karena dengan demikian masyarakat akan merasakan arti dari sebuah naungan dalam satu kepemimpinan dalam islam. Begitu juga halnya dengan perekonomian masyarakat, telah menjadi tugas pemerinta untuk memerhatikan bagaimana kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi. Dengan adanya pemekaran tersebut, maka pemerintah dengan mudah untuk menangani masalah masyarakat terutama dibidang ekonomi. Oleh karena itu pemekaran wilayah adalah cara dari pemerintah untuk mempersempit ruang lingkup guna untuk memudahkan pemerintah memantau kondisi perekonomian masyarakat.

Pemerintah Kecamatan Bangkinang yang dimekarkan wilayahnya menjadi lebih luas, disamping pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, pemekaran wilayah tersebut juga sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini juga sangat membantu masyarakat setempat yakni dengan adanya pemekaran wilayah dapat menjadi peluang-peluang bagi para investor maupun bagi para pengusaha kecil dan menengah.

Sadar atau tidak setiap wilayah baik secara alamiah, cultural maupun structural banyak memiliki perbedaan. Apabila perbedaan tersebut , tidak dikelola dengan baik, maka lahir wilayah yang kuat dan dapat mengeksploitasi wilayah yang lemah. Di dalam suatu negara yang memiliki sumber daya alam, dalam bentuk hasil laut, hasil hutan, dan beraneka macam hasil tambang (logam, bahan bakar, dan berbagai tambang lainnya) sesungguhnya adalah milik rakyat. Karena itu harus diolah, dimanfaatkan atau dijual untuk

kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat atau keluarga dan kelompok pejabat. Masalah distribusi sumberdaya alam semakin memperbesar kemiskinan sebuah bangsa jika tidak tertangani dengan baik dan ekonomi Islam mempunyai konsep yang jelas, bagaimana mengelola sumberdaya alam milik rakyat, bukan milik negara.²

Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif Islam

Disini Pemerintah memiliki kedudukan tertinggi, bisa disebut pemerintah adalah khalifah dibumi yang memegang peranan penting di dalam pembangunan ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Beberapa peran yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Peranan maupun Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah :

Mensejahterakan Rakyat

Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Al-Qur'an memaklumkan tujuan negara dalam bidang ekonomi ini :



² Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 8

Artinya: "Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya." (Thaha: 118-119)

Dalam kaitan ini, **Imam Al-Ghazali** menguraikan tanggungjawab sosial ekonomi negara :

"Tanggungjawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka".³

³<http://elfryan.blogspot.com/2012/09/kedudukan-pemerintah-dalampembangunan.html>

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari Paparan di atas, dapat diberi kesimpulan sebagai berikut :

Dampak pemekaran wilayah sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat, dalam hal ini dapat di lihat dari data table yang telah di uraikan diatas, bagaimana perkembangan perekonomian masyarakat dari tahun sebelum dan sesudah pemekaran sangat berpengaruh baik bagi masyarakat Kecamatan Bangkinang. Adapun pengaruhnya lebih menjolok kearah yang positif dan ini merupakan suatu kebijakan yang baik dari pemerintah daerah yang memanfaatkan UU Otonomi Daerah. Dengan itu pemerintah dapat mengatur wilayah yang di pimpinnya dengan sangat baik serta efektif.

1. Dampak dari pembentukan dan pemekaran wilayah, yaitu:
 - a) Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan secara cepat terangkat dan terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya kesejahteraan
 - b) Memperpendek *span of control* (rentang kembali) manajemen pemerintahan dan pembangunan, sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien, dan terkendali
 - c) Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuh kembangkan inisiatif, kreatifitas, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan

2. Masalah distribusi sumberdaya alam semakin memperbesar kemiskinan sebuah bangsa jika tidak tertangani dengan baik dan ekonomi Islam mempunyai konsep yang jelas, bagaimana mengelola sumberdaya alam milik rakyat, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan serta menambah lapangan pekerjaan, dan lain – lain. Dalam hal ini penanganan dari pemerintah sangat dibutuhkan agar sesuai dengan konsep ekonomi islam.

B. Saran

Sebagai penutup dari penelitian ini , penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang berhubungan dengan dampak pemekaran wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Wilayah yang telah dimekarkan menjadi sebuah kecamatan memberikan dampak lingkungan dan peluang yang sangat baik dikalangan masyarakat setempat, infrastruktur dan perekonomian berkembang pesat dengan adanya pemekaran wilayah tersebut. Namun sebaiknya wilayahnya sudah berkembang diharapkan masyarakatnya juga semakin sejahtera.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti lebih mendalam lagi tentang dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat sehingga hasil yang diperoleh lebih baik dan berguna bagi instansi ataupun pihak-pihak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi. Solo.
- Affendi, A. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*. P4W Press. Bogor.
- Agusniar, A. 2006. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat (Tesis)*. PascaSarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar
- Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kampar
- Dinas Tenaga Kerja Kab. Kampar
- Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta; 2007)
- Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Josef Riwu Kaho, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010).
- Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007)
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003
- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- <http://aamslametrusydiaa.blogspot.com/2011/09/ekonomi-pembangunan-perspektif-ekonomi.html>
- <http://ajdaoke.wordpress.com/2012/03/10/dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-kesejahteraan-masyarakat/>
- <http://ayok.wordpress.com/2006/12/20/pemerintahan-islam/>
- <http://ebookbrowse.com/makalah-peranan-pemerintah-dalam-peningkatan-dan-perkembangan-ekonomi-dalam-perspektif-islam-pdf-d357208921>

<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/02/03/memacu-ekonomi-syariah-melalui-peran-pemerintah/>

<http://gosharia.blogspot.com/2012/05/peran-pemerintah-dalam-ekonomi-islam.html>

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangkinang_%28kota%29&action=edit§ion=1

<http://kseirsundip.wordpress.com/2011/07/24/peran-pemerintah-dalam-ekonomi-islam/>

<http://sejarahbangkinang.blogspot.com/>

<http://www.agustiantocentre.com/?p=584>

<http://www.anneahira.com/konsep-ekonomi-syariah.htm>

<http://www.riaudailyphoto.com/2012/02/sejarah-kabupaten-kampar.html>

Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM & Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007)
Marnis, *Pengantar Bisnis*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007)

Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga : 1997), Edisi Keenam, Jilid Pertama

Riwu Kaho, Josef., *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) , cet. 8 Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 dan No. 25, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)

Thoah, Miftah, 1991. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*, Widya Mandala, Jogjakarta